

Forum Freedom 25, 07 Nopember 2005

**Tema: Kovenan Internasional tentang hak-hak social, ekonomi & budaya**  
**Nara sumber : Anies R. Baswedan**

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

**Hamid Basyaib**

Halo, selamat pagi, Anda bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Kerjasama Freedom Institute dan Radio 68 H, dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya adalah DR. Anies Baswedan, Direktur Riset The Indonesian Institute. Minggu lalu kami berbicara tentang kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan kovenan internasional tentang hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, yang baru saja diratifikasi oleh sidang paripurna DPR, pada 30 September 2005. Kelihatannya yang lebih menarik adalah hak-hak sipil di bidang ekonomi. Bukan hanya paling menarik, kalau kita ngomong civil right, itu manifestasinya yang paling jelas adalah di bidang politik dan ekonomi. Jadi bisa diukur misalnya skala bisnis dari penduduk, tingkat representasi dari penduduk, seperti tercermin misalnya di lembaga DPR dan DPRD. Dari segi itu sudah jelas mencerminkan keragaman. Tapi rupanya *civil right* di bidang ekonomi masih masalah. Minggu lalu Dr. Anies Baswedan mengatakan banyak masalah di Indonesia. Misalnya, tenaga kerja atau peluang untuk kerja. Kalau Anda melamar kerja, Anda harus mencantumkan nama, umur, agama, ras, suku, dan kadang-kadang foto. Ini menurut Anies tidak benar. Itu melukai prinsip married system. Orang tidak dilihat dari keahliannya, tapi dari fotonya. Cakep atau enggak, dsb. Anies, seberapa jauh ini jadi masalah?

**Anies Baswedan**

Ini revolusioner kalau diterapkan secara konsisten di Indonesia.

**HB**

Maksud Anda, revolusioner itu kalau orang mau ngelamar kerja tidak pakai foto, tidak perlu mencantumkan tanggal lahir, tidak perlu mencantumkan agama?

**AB**

Betul. Tidak perlu atribut-atribut yang tidak ada kaitannya dengan kontribusi dia di pekerjaan. Itu prinsipnya. Prinsipnya adalah, ketika seorang melamar pekerjaan, maka informasi yang diberikan kepada penerima lamaran ini adalah informasi-informasi yang menyangkut kontribusi dia, atau masa lalu dia dalam konteks pekerjaan yang bisa dikontribusikan ke tempat barunya. Kalau dia ganteng, itu enggak ada hubungannya. Asumsikan yang dicari orang-orang muda karena harus angkat-angkat barang berat. Sebutkan saja kualifikasi itu. Atau harus bekerja sampai malam. Jadi ada persyaratan-persyaratannya. Dan dia bisa memenuhi atau tidak. Tetapi kalau memberi batasan-batasan seperti itu, lalu policy yang pertama: potong orang yang lahirnya di bawah tahun 70. Nah sudah pasti orang yang berumur 35 tahun tidak punya peluang sama sekali. Di situlah letak diskriminasi terjadi. Ini civil right kita yang terpotong. Mendadak karena muda, karena tua, enggak bisa. Foto juga begitu. Padahal foto ini kan cepretan 0,5 detik. Ini terlalu pendek untuk mengatakan cakep dan tidaknya. Agamanya juga begitu. Ketika sampai pada agama, pertanyaannya adalah: dia mau bekerja di sini untuk aktifitas agama atau bekerja professional? Kalau mau bekerja

professional tidak ada urusannya dengan agama. Ide-ide ini barangkali tidak disukai oleh kalangan yang mengeksploitasi isu tadi.

**HB**

Misalnya siapa? Kelompok agama tertentu?

**AB**

Ya. Kelompok agama tertentu yang membangun solidaritas atas dasar agama. Kalau kita bicara hak ekonomi, itu enggak bisa lagi. Jadi saya melihat implikasi ini luar biasa di aspek ekonomi. Parameter yang paling mudah di situ. Dan kalau kita mau bicara demokrasi, definisi demokrasi itu kata David Cullier itu lebih dari 650 definisi. Jadi sebenarnya bervariasi sekali. Karena itu kita sering mendengar perdebatan mengenai demokratis atau tidaknya pemilihan presiden. Ini karena definisi tentang demokrasi yang berbeda-beda.

Tapi dalam konteks ini, barangkali begini. Ini adalah akses yang sama pada sumber ekonomi dan sumber politik. Bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan suku, usia, dan kecakapan. Tapi akses yang sama. Kalau ini ditegakkan, misalnya, Departemen Tenaga Kerja membuat peraturan yang baru: semua proses rekrutmen tidak boleh lagi membedakan berdasarkan atribut yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Apakah ini enggak revolusioner?

**HB**

Tapi kalau kita lihat halaman iklan yang mencari tenaga kerja, hampir semua perusahaan menetapkan sarat-sarat itu. Misalnya, yang dibutuhkan fluent in English. Tetapi salah satu itemnya adalah usia antara 25-30. Perusahaan itu mencantumkan. Di dunia kewartawanan pun begitu. Semua melakukan itu. Apakah kesadaran itu harus meuncul juga dari perusahaan itu atau cukup dengan diberi SK menteri?

**AB**

Misalnya begini. Kalau itu IP, itu tidak masalah. Itu adalah cermin dari prestasi mereka. Jadi mereka misalnya mensyaratkan orang yang IP-nya tiga. Etnis apapun, agama apapun, itu enggak ada urusannya, asalkan memang perform sekolahnya.

**HB**

Walaupun misalnya kalau saya mencari tenaga kerja di bidang tertentu yang belum tentu sejalan ya?

**AB**

Itu policy perusahaannya yang barangkali enggak pas. Tetapi untuk kriteria, itu tidak berlawanan dengan dengan civil right.

**HB**

Bagaimana dengan usia?

**AB**

Itu bisa jadi pertanyaan. Begitu Anda memunculkan faktor usia di dalam persyaratan, dan pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh usia berapapun juga, maka ini menjadi persoalan civil right.

**HB**

Begini masalahnya: kalau saya punya perusahaan, saya ingin tenaga kerja saya bekerja selama mungkin pada saya. Jadi untuk salah satu pekerjaan tertentu, saya akan mencari tenaga kerja yang muda. Misalnya umur 25. Ini tujuannya untuk memanfaatkan tenaga dan keahliannya sampai umur 35 tahun. Kalau dia mulai umur 48, saya hanya bisa memanfaatkan sepuluh tahun. Perusahaan saya rugi. Itu juga pertimbangannya?

**AB**

Itu ekstrim. Itu good point. Hanya sebagai rule of taming general, kalau itu ada kebutuhan spesifik, mereka perlu orang yang bisa loyal. Tapi secara umum kalau kita melakukan diskriminasi berdasarkan usia, itu sebenarnya pailit. Perusahaan punya kepentingan (merekut) orang yang berumur 35 tahun, that different story. Tapi kalau perusahaan semata-mata membutuhkan anak muda bukan karena kualifikasi, itu bisa bermasalah. Point saya di sini adalah kalau economic right ini diterapkan. Economic right itu kan dua. Satu, dari sisi kapitalisnya. Dua, dari sisi orang yang bekerja untuk kapitalis. Kalau economic right itu diterapkan pada dua kelompok ini, maka akan punya efek yang besar sekali buat redistribusi pendapatan di Indonesia.

**HB**

Saya kira kita sering dengar keluhan. Kalau orang sudah berumur 45-50an, dia cenderung tidak akan pindah kerja. Karena dia takut ditolak. Kalau mau ganti kerja karena enggak betah, dia cenderung mengurungkan niatnya. Karena perusahaannya atau tempat kerja yang lain tidak mau terima?

**AB**

Barangkali ada komponen yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi di Indonesia.

**HB**

Maksudnya apa?

**AB**

Maksudnya begini. Transaksi buruh dan majikan itu tidak semata-mata dalam konteks pekerjaan saja, tetapi ada bingkai kulturalnya: pengabdian dan pengayoman. Itu kan di luar transaksi, gaji, dan kontrak. Tapi faktanya begitu. Sehingga keputusan orang mau pindah, mau meneruskan tidak semata-mata berdasarkan unsure-unsur kalkulatif dan transaksional, tetapi itu unsur kultural yang tidak bisa dikuantifikasi.

**HB**

Eggak enak karena bosnya baik, enggak enak karena sudah kenal istrinya bos?

**AB**

Misalnya begitu. Itu mirip di Jepang. Hanya di Jepang cakupannya lebih professional. Kulturalnya lebih professional dibanding kita. Kalau kita ini agak tradisional dan tidak membangun (aktifitas pekerjaan). Kalau di Jepang itu kulturalnya ada. Saya denger 90-an ini berubah, tetapi mayoritas masih tetap punya tradisi bekerja di sebuah perusahaan sampai pensiun. Ada bingkai kultural. Hanya saja di didrill untuk berprestasi. Meskipun ada bingkai kultural, tapi bingkai kulturalnya tidak untuk menghentikan kemajuan atau mempertahankan status quo, tapi untuk merubah the entire system. Ada prestasi-prestasi di tingkat individual yang punya pengaruh secara kolektif. Karena itu kolektifitasnya dijaga. Jangan kolektifitas ini dihentikan. Orang yang sudah masuk, ya bertahan di situ. Tetapi prestasi individual mengubah secara kolektif.

Kembali pada soal economic right ini. Kalau hak-hak ekonomi ini diterapkan di tingkat kapitalis, efeknya enggak kalah besar.

**HB**

Anies berbicara panjang lebar tentang bagaimana orang melamar kerja, yang prinsip utamanya adalah tanpa sedikit pun dikaitkan dengan hal-hal lain di luar prestasi. Sekarang bagaimana kalau dari sudut employernya,

dari sudut pemberi kerja, misalnya perusahaan. Juga dalam hal ini pemerintah?

**AB**

Saya kira itu malah tepat mengungkap soal pemerintah. Begitu pemerintah meratifikasi kovenan ini, dan salah satu komponennya di sana adalah hak-hak ekonomi, termasuk hak-hak mendapatkan pekerjaan. Maka, diskriminasi berdasarkan married itu sah-sah saja. Tidak ada problem. Tapi diskriminasi yang tidak berdasarkan married jadi bermasalah. Di sini konsekwensi pertamanya adalah pemerintah harus melaksanakan kovenan ini untuk dirinya sendiri sebelum dia meregulate pelaku-pelaku bisnis untuk taat dengan kovenan ini. Jadi pemerintah tidak bisa lagi rekrutmen dengan yang tadi kita diskusikan. Itu pertama. Yang kedua, ketika pemerintah memberikan hak-hak untuk berpartisipasi dengan proyek-proyek pembangunan atau aktifitas bisnis, enggak bisa lagi lisensi itu berdasarkan asal daerah, ras, suku. Itu udah gak bisa lagi. Kalau itu terjadi tanpa policy yang jelas, maka itu bisa dijadikan salah satu bukti pelanggaran atas kovenan ini. Kovenan ini melarang diskriminasi semacam itu. Jadi di tingkat kapitalis pun diskriminasi ini tidak bisa terjadi lagi. Ini pemerintah yang harus mulai.

**HB**

Artinya pemerintah pastilah harus menindaklanjuti dengan serangkaian peraturan-peraturan di bawahnya. Misalnya keputusan presiden, keputusan menteri yang dinafasi oleh kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi ini?

**AB**

Ini menyangkut dua hal mengenai policy ini. Satu, memang fungsi prevensi. Jadi bagaimana tidak terjadi diskriminasi. Tapi yang lebih penting dalam konteks kita, kalau sudah terjadi dan sudah berjalan puluhan tahun, maka perlu ada *affirmative action*, mengembalikan proporsi. Sebetulnya kalau saya sebut proporsi itu agak takut. Begini. Kalau kata proporsi itu definitive. Persentase suku Jawa sekian, suku Padang sekian, lalu jadinya mencerminkan itu. Padahal bukan itu, *that not a point*. Pointnya adalah ketika ada dominasi berdasarkan etnis, agama yang di luar kewajaran, maka ada intervensi dari negara untuk menyeimbangkan itu. Ini kalau di dalam kajian *publik policy* itu sering disebut komponen-komponen yang market tidak bisa berfungsi, *area were the market failed*. Lalu penetrasi dilakukan. Aspek-aspek diskriminasi macam begini biasanya pasar itu enggak bisa melakukan. Jadi *the invisible hand* itu sering mengalami kegagalan untuk membenahi komponen-komponen yang sifatnya non market.

**HB**

Jadi intervensi negara merupakan satu-satunya harapan?

**AB**

Ya, ketika sudah sampai pada hukum. Tetapi untuk menekan itu tidak harus pemerintah. Cukup dengan public exposer saja sudah memalukan...

**HB**

Saya kira Anda mengasumsikan bangsa kita punya rasa malu. Tapi banyak kasus menunjukkan sebaliknya. Koruptor diekspos dan rekeningnya dibebankan, tapi pesta pernikahan anaknya tetap saja dirayakan dengan mewah. Itu sering terjadi. Tapi maksud saya begini: bagaimana cara mengontrolnya?

**AB**

Begini. Kalau misalnya menyangkut aktifitas ekonomi, ini buat mereka penting. Koruptor-koruptor itu kan individu. Merka itu eksis bukan

karena akseptabilitas publik. Misalnya, seorang tiokoh partai X. kemudian tertangkap korup. Dia ketahuan korupsi itu enggak akan dapat *punishment* dari publik untuk eksistensi politiknya. Eksistensi politiknya tergantung elit-elit partai. Itu enggak penting. Jadi selama elit-elit partai masih bisa dibeli, *that's fine*. Ini konsep right. Tapi kalau ini adalah sebuah bank, sebuah perusahaan besar yang menyangkut jutaan customer, it's matter.

**HB**

Tapi mungkin saja kalau contohnya bank. Bank adalah institusi yang sangat sensitif untuk urusan uang. Direktornya dituduh korupsi dan ditahan, kemudian bank itu langsung dirush. Bisa bangkrut. Mungkin benar dalam kasus bank. Tapi tidak dalam kasus Mahkamah Agung. Begitu santernya disuruh mundur tapi enggak mau. Tapi begini. Kalau Anda tadi ngomong soal peraturan sebagai tindak lanjut logis dari kovenan internasional, pemerintah menerbitkan aturan bahwa mulai sekarang semua instansi pemerintah mestinya menerima pegawai tidak berdasarkan aturan-aturan sebelumnya. Tekhnisnya jelas, tidak perlu pakai foto, dsb. Lalu dari situ melebar ke lembaga-lembaga bisnis. Mestinya mereka melakukan itu setelah pemerintah melakukannya...

**AB**

Itu mau enggak mau karena pemerintah yang buat aturan. Bagaiamana mungkin pemerintah membuat aturan sementara dia sendiri tidak menjalankan. Jadi logikanya harus dari pemerintah. Mereka meratifikasi, mereka menjalankan, dan mereka yang menegakkan di tingkat publik. Penegakan di tingkat publik ini tricky dan perlu waktu. Tapi penegakkan di tingkat pemerintah itu sesuatu yang instanious bisa. Asal ada kemauan aja. Di kita, problemnya barangkali tidak mudah. Sesudah otonomi daerah misalnya, salah satu criteria rekrutmen adalah harus putra daerah. Itu masalah sendiri. Mendadak warga negara Indonesia mendapatkan diskriminasi. Ini salah satu contoh. Ini hal kecil tapi fundamental. Ini pelanggaran civil right, economic right..

**HB**

Untuk rekrutmen pegawai biasa, apakah putra daerah itu berlaku?

**AB**

Saya punya kasus: teman saya mau pindah dari Jakarta ke Bali sulitnya setengah mati. Jadi dia mengalami kesulitan mendapatkan posisi di Bali. Dia pindah karena suaminya ikut pindah. Ternyata tidak mudah.

**HB**

Sebagai pegawai negeri?

**AB**

Ya. saya enggak tahu birokrasi pegawai negeri. Saya sendiri bukan pegawai negeri. Tetapi ini mencerminkan spirit kedaerahan (yang sempit). Ini bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Yang nampaknya dianggap wajar sebagai respon atas penetrasi "tenaga kerja asing" di wilayahnya. Lalu sekarang berbalik dan dibalas. Tetapi ini tidak sehat bagi Indonesia di masa depan. Kalau (kovenan) ini diterapkan kan indah, kalau KTPnya warga negara Indonesia, asalnya dari mana, lahirnya di mana, itu enggak ada masalah. Enggak bisa lagi dibedakan berdasarkan asal daerah.

**HB**

Sebetulnya bangsa kita ini mendapatkan berkah dari praktek selama ini dari interaksi etnis-etnis?

**AB**

Yang menarik dibandingkan dengan tempat-tempat lain adalah intensitas perkawinan lintas etnisnya tinggi. Relatif tinggi dibandingkan India yang diverse negaranya, Rusia atau Amerika. Perekat-perekatnya sudah ada. Hanya bagaimana kita membuat itu menjadi sesuatu yang eksplisit. Kalau kembali ke hal ekonomi, ini yang paling mudah untuk dilihat, dirasakan, dan "paling berat efeknya". Efek perubahannya sangat besar.

**HB**

Apa dampaknya kalau kovenan ini tidak ditindaklanjuti menjadi peraturan-peraturan yang lebih rendah, yang blangsung bisa operasional di lapangan?

**AB**

Kalau hak ekonomi, kita akan sering melihat letupan-letupan horizontal. Begitu penguasaan pasar oleh satu etnis, itu mudah sekali terjadi konflik. Itu resep timbulnya konflik horizontal.

**HB**

Saya kira itu yang terjadi di Maluku?

**AB**

Atau di Kalimantan ketika kasus Dayak dan Madura. Bukan hanya pasar, tapi sektor-sektor ekonomi. Begitu etnisnya berbeda, mereka tidak bisa penetrasi. Ketika enggak bisa penetrasi, aktifitas usaha dibatasi oleh variable-variabel etnisitas, suku, ya menunggu masalah saja. Ya, bangsa ini akhirnya habis waktunya untuk melakukan koreksi atas letusan-letusan yang terjadi, yang sebetulnya bisa dihindari apabila dari awal dibuat desain institusi yang memungkinkan etnis manapun, suku manapun jadi atribut-atribut right. Atribut-atribut itu tidak berpengaruh pada hak-hak dia dalam melakukan aktifitas ekonomi.

**HB**

Kalau dalam bidang politik, hal itu sudah dilakukan oleh tentara dan polisi. Anda perhatikan misalnya orang Jawa jadi Kapolres Bali. Orang Ambon jadi Kapolwil Sumatra Utara..

**AB**

Itu menarik sekali, very good point. Bagaimana institusi yang paling nasional, selain pemerintah itu sendiri, itu institusi militer. Kalau terbukti mereka melakukan, that exactly mean it..

**HB**

Nah justru yang saya lihat sekarang ini mulai ada sedikit pergeseran. Ini yang mengarah ke arah kemunduran. Misalnya begini: Anda enggak bisa harapkan Kapolwil Bali berasal dari non-Bali...

**AB**

Sayang kalau terjadi kemunduran seperti itu..

**HB**

Mudah-mudahan enggak ada. Tapi saya baca beberapa tahun terakhir ini terjadi sesuatu yang aneh: enggak bisa lagi Kapolwil di Yogya berasal dari Palembang, misalnya. Mestinya bisa. Ok, waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran Anda.